

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Tinjauan Historis

Pada dasarnya konsep tinjauan historis terdiri dari atas dua kata yaitu tinjauan dan historis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “tinjauan berarti menjenguk, melihat, memeriksa dan meneliti untuk menarik kesimpulan.” (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997:554). Kata Historis berasal dari bahasa Yunani “Istoria” yang berarti ilmu yang biasanya diperuntukkan bagi penelahan mengenai gejala-gejala terutama hal ihwal manusia secara kronologis.” (H.Rustam E. Tamburaka, 1999:2). Selain itu juga, ada beberapa istilah-istilah yang ekuivalen dengan kata “*historis*” seperti *geschichte* (Jerman), *Geschiedenis* (Belanda).” (H.Rustam E. Tamburaka, 1999:2). Dalam bahasa Indonesia kata historis lebih dikenal dengan sejarah yang berasal dari Bahasa Arab yakni “*syajarah*” yang berarti pohon.” (H.Rustam E. Tamburaka, 1999:2) sehingga kata tinjauan historis memiliki padanan kata dengan tinjauan sejarah.

Ada beberapa definisi atau batasan mengenai sejarah. Menurut Hugiono dan P.K Poerwantana, “sejarah merupakan gambaran tentang perubahan-perubahan peristiwa pada masa lampau.” (Hugiono dan P.K Poerwantana, 1992:9-10).

Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo membagi sejarah dalam dua pengertian, yaitu: Sejarah dalam arti subyektif adalah suatu konstruk bangunan yang disusun penulis sebagai uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau inti yang mencakup fakta-fakta terangkaiakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsur bertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsur itu saling menopang satu sama lain.

Sejarah dalam arti obyektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri atau proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi dan tidak dapat terulang kembali. Bagi orang yang mengalami suatu kejadian sebenarnya hanya dapat mengamati dan mengikuti sebagian dari totalitas kejadian atau peristiwa itu. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas dari subyek maupun juga; jadi, obyektif dalam arti tidak memuat unsur subyek (pengarang atau pengamat). Dalam ucapan “sejarah berulang” rupanya yang dimaksud adalah sejarah dalam arti obyektif, sedangkan ucapan “kita perlu belajar sejarah” akan lebih menunjuk sejarah dalam arti subyektif. (Sartono Kartodirdjo, dalam H. Rustam E. Tamburaka, 2009:14)

Menurut Muhammad Yamin, “sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya berhubungan dengan cerita bertarih sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain” (Muhammad Yamin. Definisi Sejarah Menurut Para Ahli dimuat dalam <http://blog.bukukita.com>).

Sidi Gazaldi mencoba menggambarkan “sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang member pengertian dan kephahaman tentang apa yang berlaku.” (Sidi Gazaldi. Definisi Sejarah Menurut Para Ahli. dimuat dalam "<http://blog.bukukita.com>)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka peneliti mendeskripsikan sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami manusia dan disusun secara sistematis sehingga hasilnya dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian konsep tinjauan historis adalah suatu prosedur penelitian terhadap segala peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang terjadi pada manusia kemudian disusun secara sistematis, logis, faktual, sehingga memiliki makna yang jelas terhadap fenomena tersebut.

Berdasarkan konsep di atas, maka konteks tinjauan histories dalam penelitian ini adalah suatu penelitian peristiwa masa lampau mengenai aktivitas politik Perhimpunan Indonesia di Belanda yang ditulis berdasarkan kerangka teoritis dalam penulisan kajian sejarah dan memberi pengertian atas peristiwa tersebut.

2.1.2 Konsep Aktivitas Politik

Yang dimaksud dengan aktivitas politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan politik, baik aktivitas memilih dalam pemilu (voting), maupun aktivitas selain itu. (Milan, 2005). Milan menjabarkan banyak contoh dari aktivitas politik, yaitu mencari informasi tentang isu politik, menandatangani petisi, boikot produk, demonstrasi, menghadiri dan berbicara dalam forum internasional, mengekspresikan pendapat pada media atau politisi, diskusi politik dan kerja sukarela untuk partai politik. (Milan, 2005).

Di antara berbagai aktivitas politik tersebut maka aktivitas politik yang sesuai dengan konteks permasalahan dan pembahasan, hanya di batasi pada aktivitas politik menghadiri dan berbicara dalam forum internasional, mengekspresikan pendapat pada media dan diskusi politik.

Pada masa pergerakan nasional aktivitas politik yang dilakukan digerakkan oleh organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada masa itu. Aktivitas politik pada awal pergerakan nasional adalah untuk sekedar meningkatkan derajat hidup. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran kaum terpelajar aktivitas politik merupakan suatu usaha dalam mencapai cita-cita nasional yakni kemerdekaan bangsa.

Suatu negara yang terjajah seperti Indonesia, aktivitas politik yang dilakukan adalah bertujuan untuk melepaskan belenggu penjajahan berupaya mencapai kemerdekaan dalam arti negara yang berdaulat. Sebagaimana tercantum pada alenia kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:...kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Bahan Penataran, 1989:189)

Peranan organisasi pergerakan memang disadari banyak memberi perubahan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, seperti yang dikemukakan C.S.T Kansil sebagai berikut: setelah abad ke-20 perlawanan bangsa Indonesia dalam menentang penjajah telah berubah menjadi gerakan terorganisir secara modern. (C.S.T Kansil, 1982:21).

Pada periode sejak lahirnya Budi Utomo tahun 1908 sampai kepada masa berakhirnya penjajahan atas Indonesia tahun 1945, perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan lebih mengarah pada taktik diplomasi, seperti yang dikemukakan Abdul Haris Nasution sebagai berikut; bahwa perlawanan tersebut tanpa senjata, tanpa gerilya dan mulailah cara-cara menurut kemerdekaan menyadarkan rakyat melalui partai politik negara barat. (A.H Nasution, 1977:50).

Tujuan aktivitas politik pada masa pergerakan kebangsaan adalah untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh L.M Sitorus, bahwa pergerakan kebangsaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan terutama perjuangan bangsa Indonesia yang mempergunakan organisasi modern yang merupakan gerakan partai politik. (L.M Sitorus, 1962:5)

Demikian juga aktivitas politik yang dilakukan Perhimpunan Indonesia di Belanda yang merupakan wujud dari usaha propaganda kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. . Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasionalis yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Seperti yang diutarakan oleh M. Hatta dalam tulisannya *Slotsverklaring (Penjelasan Penutup)* tentang karakteristik Perhimpunan Indonesia, yaitu:

Perhimpunan Indonesia adalah organisasi nasionalis yang bertendensi politik. Walaupun tujuannya adalah “menyiapkan kemerdekaan Indonesia”, dan sarana untuk tujuan “memajukan kesatuan berpikir Indonesia”, tetapi nyatanya, karena dibentuk di negeri Belanda, kerjanya jadi kurang matang. Tentu saja secara umum PI hanya dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan teori politik saja.

Tujuan PI hanya dapat sungguh berarti melalui sebuah partai nasional yang didukung massa di Indonesia sendiri. Dari kenyataan ini, sejak tahun lalu, dengan penuh semangat PI telah berusaha menghidupkan sebuah partai rakyat nasional Indonesia. Sebagai langkah awal, prinsipnya harus diperkenalkan lebih dahulu lewat propaganda. (M. Hatta. *Slotsverklaring (Penjelasan Penutup)* di muat dalam John Ingleson, 1993:108)

Hatta menjadi *Voorzitter* (Ketua) Perhimpunan Indonesia terlama yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930, sebelumnya setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Perhimpunan Indonesia kemudian menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda.

Perhimpunan Indonesia secara teratur mengadakan pertemuan di mana mereka mengutuk kejahatan kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia dengan segera. Mereka berusaha mengadakan kontak dengan orang-orang Belanda atau organisasi internasional yang menaruh simpati terhadap perjuangan mereka, dan dengan bersemangat mereka berdebat tentang perkembangan dari hari ke hari dalam rapat anggota maupun rapat pengurus Perhimpunan Indonesia serta menyelenggarakan protes terbuka menentang reaksi pemerintah Hindia Belanda terhadap gerakan nasional. Makin intensifnya kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dan makin sibuknya Perhimpunan Indonesia sebagai katalisator bagi suatu gerakan kebangsaan terpadu yang baru di Indonesia dapat ditelusuri sampai pada kedua tahun 1925.

Munculnya Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi politik telah banyak memberikan bagi bangsa Indonesia serta menjadikan inspirasi bagi organisasi politik yang lainnya. Perhimpunan Indonesia memiliki peran dan andil yang besar

dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia untuk bebas dari cekeraman penjajah dan mencapai Indonesia merdeka.

Melalui pengertian tentang aktivitas politik yang dipaparkan di atas maka konteks ini aktivitas politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya Perhimpunan Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengakhiri penjajahan yang dilakukan di negeri Belanda. Upaya Perhimpunan Indonesia dalam aktivitas-aktivitas politik dilakukan melalui diskusi politik, mengekspresikan pendapat pada media serta menghadiri dan berbicara dalam forum internasional.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur dapat dibuat suatu kerangka berpikir tentang aktivitas politik Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.

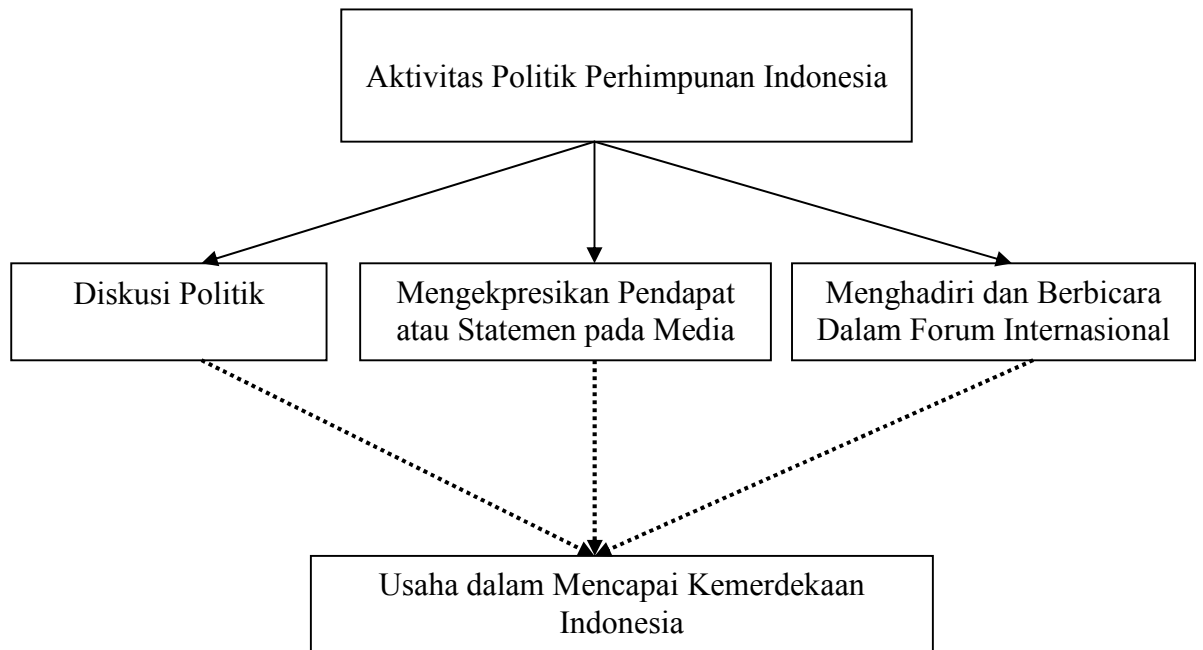
Pada masa pergerakan nasional di Indonesia, organisasi-organisasi pergerakan yang lahir di tanah air pada pada masa itu seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam tidak langsung bergerak dalam bidang politik. Begitu pula halnya dengan organisasi yang lahir di negeri Belanda seperti organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia yang pada awal berdirinya masih bernama *Indische Vereeniging* tidak langsung bergerak dalam bidang politik. Namun seiring dengan masuknya generasi baru dalam tubuh organisasi tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap pemikiran mahasiswa-mahasiswa di negeri Belanda terhadap tujuan

dan cita-cita pergerakan. Dimulai dengan penegasan identitas kebangsaan melalui perubahan nama dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* hingga berganti lagi menjadi Perhimpunan Indonesia terlihat telah tercermin suatu tujuan yang jelas yaitu cita-cita kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajahan Belanda.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perhimpunan Indonesia mengubah metode gerakan dari sosial budaya menjadi bergerak dalam bidang politik. Perubahan aktivitas Perhimpunan Indonesia ke dalam bidang politik dilakukan secara perlahan, mengingat masih hebatnya pengawasan pemerintah Belanda. Namun perlahan Perhimpunan Indonesia akhirnya secara terang-terangan bergerak dalam bidang politik terutama saat diketuai oleh Mohammad Hatta. Aktivitas politik yang dilakukan perhimpunan Indonesia yaitu sebelum berganti nama yaitu diskusi-diskusi politik, mengekspresikan pendapat melalui media yang dituangkan dengan menerbitkan majalah Hindia Poetra dan Gedenkboek, serta menghadiri dan berbicara di dalam forum internasional.

Berbagai aktivitas politik yang dilakukan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda menunjukkan tujuan organisasi tersebut dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

2.3 Paradigma



Keterangan :

—————> : Garis hubungan

.....> : Garis pengaruh